



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2024



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	1
1.3 Isu-Isu Strategis.....	4
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	10
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	12
2.4 Instrument Pendukung Capaian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran.....	24
3.3 Inovasi.....	24
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Rekomendasi	26
LAMPIRAN	
Kegiatan Jateng Bersholawat Tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat	
Kegiatan Mudik Gratis Tahun 2024	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	5
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	5
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana	6
Tabel 1.6 : Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2024.....	8
Tabel 2.1 : RPJMD 2019-2024 Biro Kesejahteraan Rakyat.....	11
Tabel 2.2 : Renja TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat.....	11
Tabel 2.3 : Arah Kebijakan TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat.....	12
Tabel 2.4 : Perjanjian KinerjaTA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat....	12
Tabel 2.5 : Program dan Anggaran TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat.....	13
Tabel 3.1 : Interval Nilai Capaian Kinerja.....	18
Tabel 3.2 : Sasaran Strategis dan Indikator	19
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2024	20
Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 – 2024...	21
Tabel 3.5 : Capaian Kinerja 2024 terhadap Target Akhir 2024	21
Tabel 3.6 : Analisis Capaian Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.7 : Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis 2024	23
Tabel 3.8 : Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2024	23
Tabel 3.9 : Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2024	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Cascading Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	2
Gambar 1.2 : Peta Proses Bisnis	3
Gambar 1.3 : Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat	4
Gambar 2.1 : ePlanning.jatengprov.go.id	14
Gambar 2.2 : eBudgeting.jatengprov.go.id	14
Gambar 2.3 : ePenatausahaan.jatengprov.go.id	15
Gambar 2.4 : eControlling.jatengprov.go.id	16
Gambar 2.5 : Silap Online Desa Dampingan	16
Gambar 2.6 : Silap Online CSR	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan RakyatProvinsi Jawa TengahTahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pergub 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024(Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2018 – 2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

TEGOCH HADI NOEGROHO, SH

Pembina

NIP. 19710630 199203 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Dalam rangka perwujudan *good governance* dan *clean government* itulah maka Biro Kesejahteraan Rakyat berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun teknis penyusunan dan implementasi SAKIP mengacu pada Permen-pan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1. Mandat Kinerja

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kedudukan Biro Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga.

**CASCADING BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

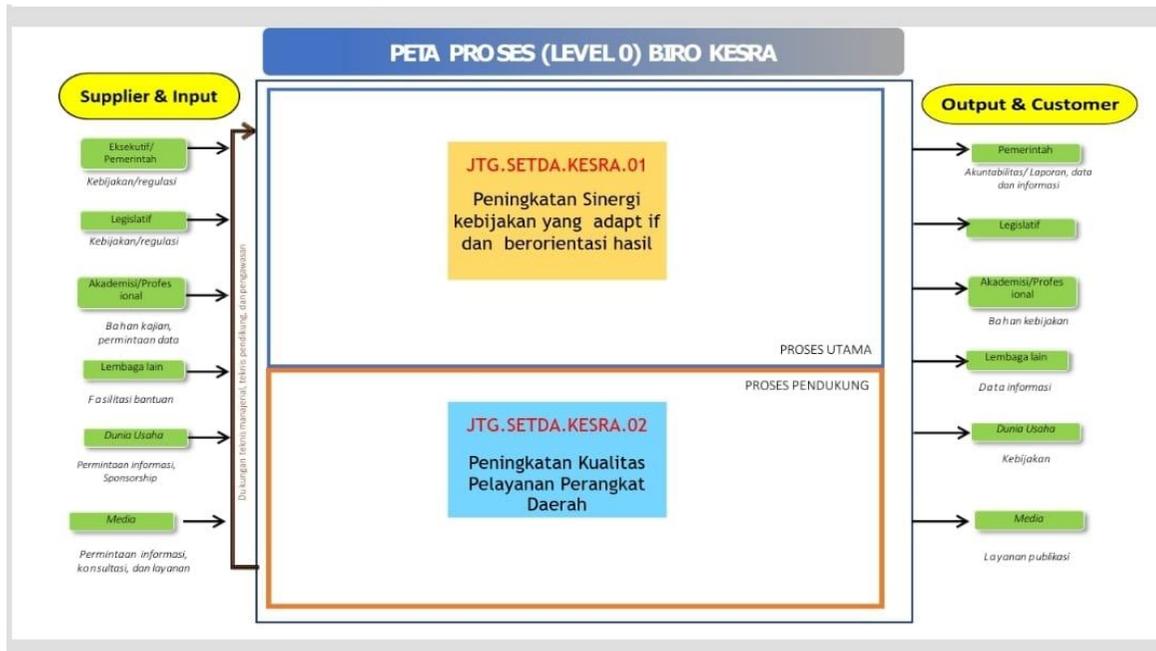
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	Jumlah Fasilitas Keagamaan yang dalam kondisi baik tahun berjalan dikurangi jumlah Fasilitas Keagamaan yang dalam kondisi baik tahun lalu dibagi jumlah Fasilitas Keagamaan yang dalam kondisi baik tahun lalu dikali 100%	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Kegiatan penyusunan kebijakan bidang keagamaan Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah indikator sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran perangkat daerah dikali 100%		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial
					Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Keluarga Berencana Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Administrasi Umum	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Biro Kesejahteraan Rakyat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Biro Kesejahteraan Rakyat

Gambar 1.1 Cascading Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

2. Peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program kegiatan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah agar organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal

maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.



Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tupoksinya, Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1). Bagian Keagamaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
 - b. Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 2). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dikbudkesosnakertrans), terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (Dikbud dan Perpus);
 - b. Sub Bagian Kesehatan; dan
 - c. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans);
- 3). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (Permas KB dan Pora), terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA Dalduk dan KB);
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Permasdesdukcapil); dan

- c. Sub bagian Kepemudaan dan Olahraga (Pora).

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat

1.3 Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis (Renstra) Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 yaitu :

1. Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi kebijakan bidang pemerintahan;
2. Pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Jawa Tengah belum optimal;
3. Pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai kewenangan belum dilaksanakan secara optimal oleh Kabupaten/Kota;
4. Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Susunan Kepegawaian

Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 adalah sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang (personal), dengan susunan kepegawaian sebagai berikut:

a. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Susunan kepegawaian pada Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Keagamaan	-	-	1	2	10	13
Bagian Pendidikan, Kebudayaan Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-	4	6	10
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	4	11	15
Jumlah Total	1	-	1	10	27	39

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

b. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Susunan kepegawaian pada Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Jumlah
1	2	3	4	5
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Keagamaan	3	9	1	13
Bagian Pendidikan, Kebudayaan Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2	8	-	10
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	11	-	15
Jumlah Total	10	28	1	39

Tabel 1.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

c. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Strata Pendidikan

Susunan kepegawaian pada Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Doktoral (S3)	Pasca Sarjana (S2)	Sarjana (S1)/ D4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP/ST	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	1
Bagian Keagamaan	-	4	6	3	-	-	13
Bagian Pendidikan, Kebudayaan Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	4	6	-	-	-	10
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	-	4	11	-	-	-	15
Jumlah Total	-	13	23	3	-	-	39

Tabel 1.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Strata Pendidikan

d. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Susunan kepegawaian pada Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Keagamaan	6	7	13
Bagian Pendidikan, Kebudayaan Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6	5	11
Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	10	14
Jumlah Total	17	22	39

Tabel 1.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor. Lemari Besi/Metal	10	Baik
2	Meubelair. Meja 1/2 Biro	4	Baik
3	Meubelair. Kursi Rapat	80	Baik
4	Alat Pendingin Lemari Es	1	Baik
5	Dispenser	7	Baik
6	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
9	Kursi Rapat Kerja Eselon II	20	Baik
10	Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu	1	Baik
11	Pendingin Ruangan (AC)	7	Baik
12	Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu	1	Baik
13	Almari Besi 2 Pintu	1	Baik
14	Filling Cabinet	1	Baik
15	Meja Informasi	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
16	Meja Computer	13	Baik
17	Kursi Putar Manager	32	Baik
18	Kursi Tunggu Isi 4	1	Baik
19	Kursi rapat	1	Baik
20	LED TV 32 Inch	1	Baik
21	Printer Laserjet	1	Baik
22	Komputer PC	13	Baik
23	Laptop Acer	1	Baik
24	Laptop Lenovo 9220	2	Baik
25	Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU	6	Baik
26	Printer Brother	1	Baik
27	Proyektor	3	Baik
28	Kursi Kerja Eselon III dan IV	10	Baik
29	Kursi Eselon II	1	Baik
30	Printer Epson	1	Baik
31	Personal Komputer Desktop HP	5	Baik
32	Meja Kantor	1	Baik
33	Almari Pakaian	1	Baik
34	Printer DeskJet EPSON L3110	10	Baik
35	Laptop ACER Z3-451/8	3	Baik
36	Kursi Staf	20	Baik
37	Meja Komputer Orbitrend	10	Baik
38	Printer HP Laserjet Pro MFP M28A	6	Baik
39	Printer DeskJet EPSON L6160	1	Baik
40	Mobil Operasional	5	Baik
41	Sepeda Motor	2	Baik
42	Kamera	1	Baik
43	TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH [UA65RU7100]	2	Baik
44	Portable AUDIO	1	Baik
45	Uninterruptable Power Supply	10	Baik
46	External Hardisk	2	Baik
47	Meja rapat	1	Baik
48	Sofa tamu	7	Baik
49	Kursi tamu	1	Baik

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

3. Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2024 pada Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebesar Rp 441.239.749.000,- (empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran pada tahun 2024 tersebut naik sebesar 3,43% dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 426.617.610.000,- (empat ratus dua puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh juta rupiah). Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2024 adalah untuk membiayai 2 (dua) Program dengan 4 (empat) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT - MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
				(Rp)	(%)
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	540.259.000	540.259.000	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.259.000	540.259.000	-	-
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.259.000	400.259.000	-	-
2	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	140.000.000	140.000.000	-	-
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	440.541.225.000	440.699.490.000	158.265.000	34,29
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	438.203.725.000	438.396.990.000	193.265.000	41,73
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	435.272.850.000	434.236.115.000	- 1.036.735.000	- 0,24
4	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.930.875.000	4.160.875.000	1.230.000.000	41,97
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.045.000.000	1.025.000.000	- 20.000.000	- 5,92
5	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	310.000.000	296.454.000	- 13.546.000	- 4,37
6	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	415.000.000	408.546.000	- 6.454.000	- 1,56
7	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	320.000.000	320.000.000	-	-
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Non Rakyat Pelayanan Dasar	1.292.500.000	1.277.500.000	- 15.000.000	- 1,52
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	302.500.000	302.500.000	-	-
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	990.000.000	975.000.000	- 15.000.000	- 1,52
	TOTAL	441.081.484.000	441.239.749.000	158.265.000	0,04

Tabel 1.6 Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2024

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja menguraikan dan menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menguraikan dan menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2019 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

1. Visi

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018 – 2024 adalah **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 – 2024, dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi pertama

dan ketiga yaitu: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI serta Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2024 untuk Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	85	85	85	85
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	85	85	85	85

Tabel 2.1 RPJMD 2019-2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024, tujuan, sasaran dan program jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	42
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	95

Tabel 2.2 Renja TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan TA 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	optimalnya upaya peningkatan pembinaan mental masyarakat	1 Ngaji Bersama Gubernur/Wakil Gubernur (Jateng bersholawat) dan sarasehan 2 Hibah Insentif pendidik keagamaan 3 Hibah BOSDa MA 4 Hibah pendidikan keagamaan (sarpras) 5 Hibah keagamaan (sarana peribadatan)
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan Optimalisasi pengelolaan sistem Peningkatan kapasitas SDM , pembinaan kelembagaan, dan advokasi	1 Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah 2 Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah 3 Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup 4 Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah 5 Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah

Tabel 2.3 Arah Kebijakan TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berikut tabel perjanjian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat serta tabel Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Pelayanan Dasar	%	95
2	Meningkatkan efektivitas pembangunan urusan non pelayanan dasar	Persentase Capaian Kinerja program Bidang Non Pelayanan Dasar	%	95
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan	Persentase Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	%	42
4	Terlaksananya Administrasi Umum dan Keuangan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum dan Keuangan	%	100

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) Program yang didukung oleh APBD (Perubahan) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 441.239.749.000,- (empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan

juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian program dan indikator kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Administrasi Umum	Persentase Fasilitas Administrasi Umum dan Pelaporan Keuangan	100	540.259.000
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitas bidang Keagamaan	42	438.396.990.000
		Persentase Capaian Kinerja program Bidang Pelayanan Dasar	95	1.025.000.000
		Persentase Capaian Kinerja program Bidang Non Pelayanan Dasar	95	1.277.500.000
		TOTAL		441.239.749.000

Tabel 2.5 Program dan Anggaran TA 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat

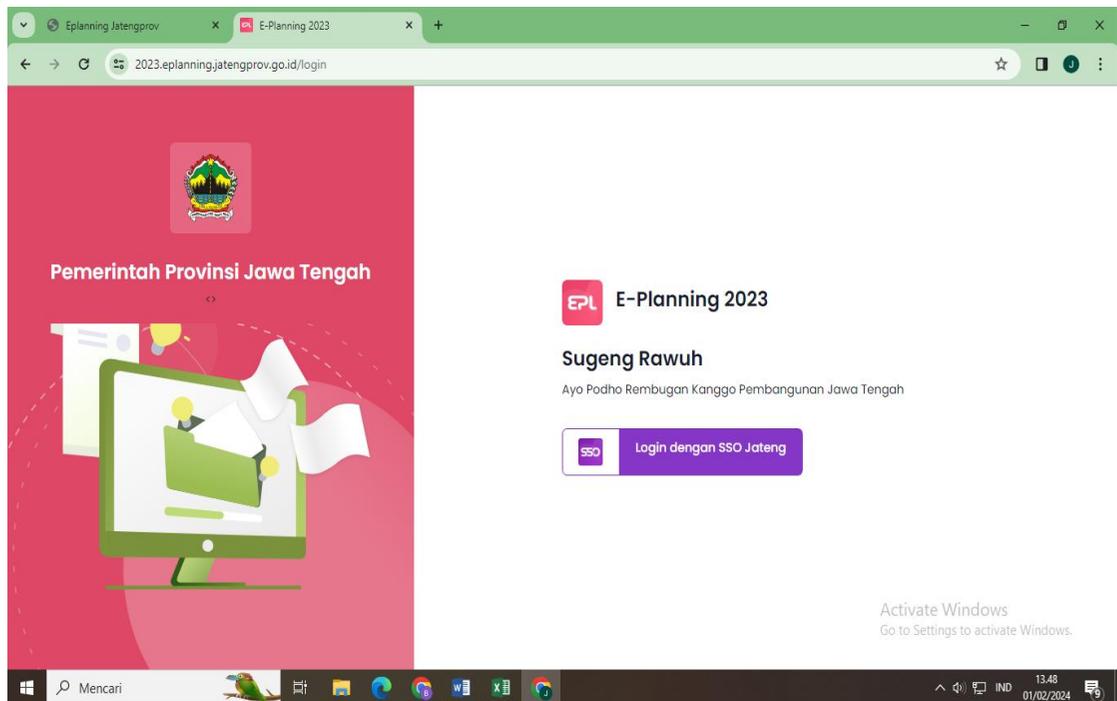
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan didukung beberapa aplikasi pendukung yaitu:

1. ePlanning.jatengprov.go.id

ePlanning merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan program kegiatan pada tahun 2024. ePlanning berfungsi:

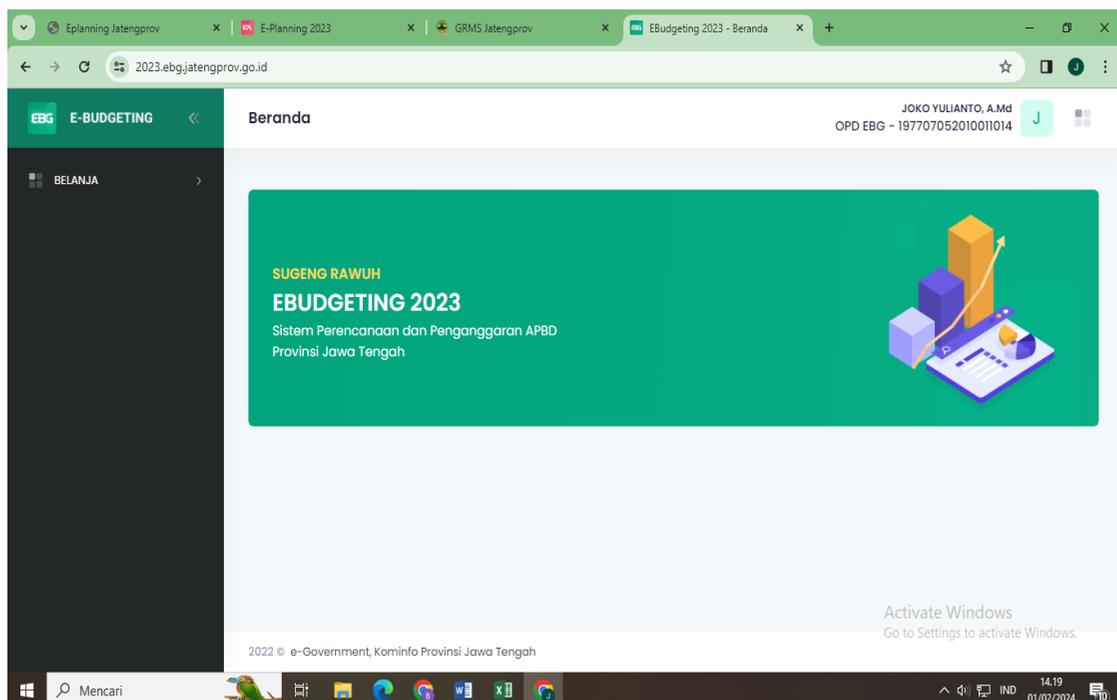
- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan secara *On-Line*
- Database terintegrasi, data Perencanaan digunakan untuk data sistem yang Lain
- Pengaturan Waktu Pertahanan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan tepat waktu
- Pengawasan serapan anggaran menjadi lebih mudah
- Proses perencanaan menjadi praktis dan mudah
- Mendukung *Single Sign On / SSO* (satu login untuk beberapa sistem)



Gambar 2.1 ePlanning.jatengprov.go.id

2. eBudgeting.jatengprov.go.id

eBudgeting merupakan sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD. Sistem ini memungkinkan dilakukan kontrol setiap tahapan perencanaan menjadi lebih mudah serta memungkinkannya adanya transparansi dalam penyusunan anggaran.

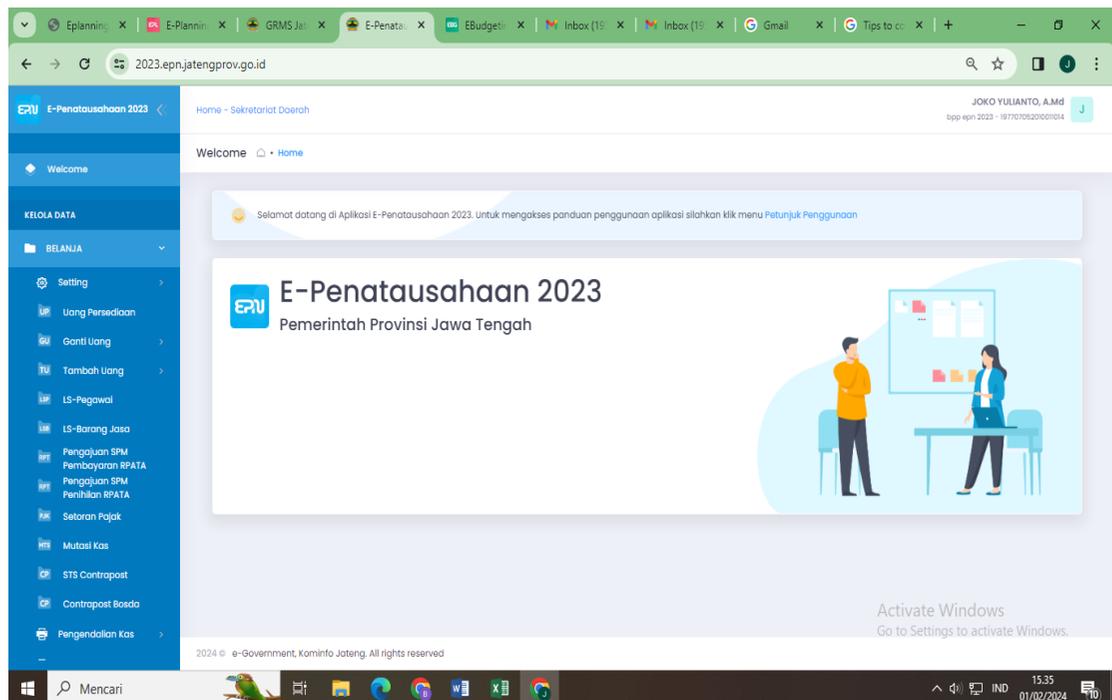


Gambar 2.2 eBudgeting.jatengprov.go.id

3. ePenatausahaan.jatengprov.go.id

ePenatausahaan merupakan sistem yang mengakomodasi penatausahaan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap

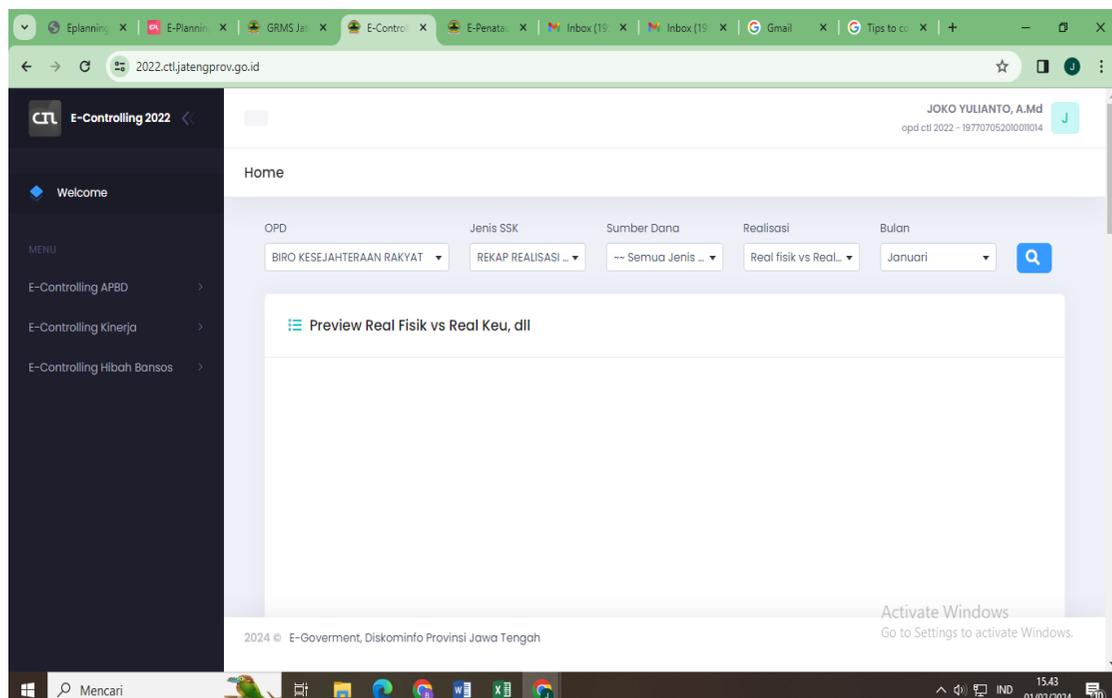
pelaksanaan (realisasi) keuangan APBD Biro Kesejahteraan Rakyat. Sistem ini mampu menyediakan informasi real dan up to date (terkini) realisasi keuangan APBD Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai laporan bagi pengguna internal maupun pihak eksternal seperti pemeriksa keuangan.



Gambar 2.3eBudgeting.jatengprov.go.id

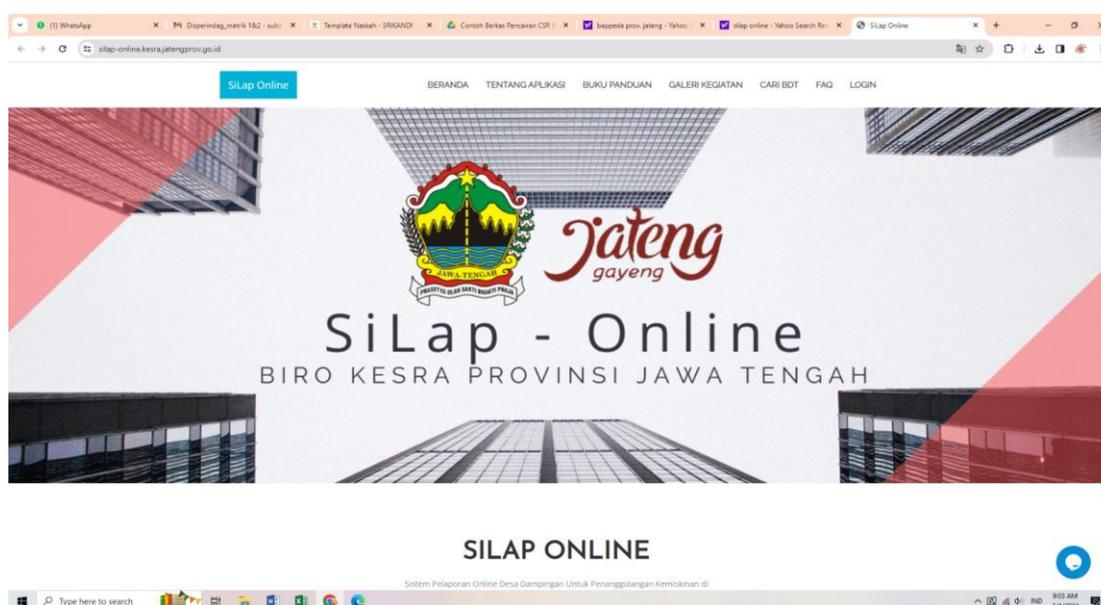
4. eControlling.jatengprov.go.id

eControlling merupakan sistem yang dikembangkan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini menggabungkan antara rencana anggaran sampai dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan, serta mampu memberikan informasi kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait untuk melihat dan menganalisa serapan keuangan dan realisasi keuangan dibandingkan target-target keuangan dan fisik setiap bulannya maupun tahunan.



5. Silap Online Desa Dampungan

Sistem Pelaporan (Silap) Online Desa Dampungan merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Sistem ini digunakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan/melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampungan desa dalam upaya intervensi secara langsung penanggulangan kemiskinan di desa-desa dampungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan tersebut dipergunakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi dan sebagai *database* terkait efektifitas intervensi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.



Gambar 2.5 Silap Oline Desa Dampungan

6. Silap Online CSR

Sistem Pelaporan (Silap) Online CSR merupakan sistem pelaporan berbasis sistem yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dan dipergunakan oleh dunia usaha/perusahaan (Swasta/BUMN/BUMD/Perorangan) untuk melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilaksanakan serta pelaporan rencana kegiatan TJSLP/CSR pada tahun yang akan datang.



Gambar 2.5 Silap Oline CSR

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	>100%	Sangat Baik
2.	85 – 100%	Baik
3.	65– 84,99%	Cukup
4.	50 – 64,99%	Kurang
5.	<50,%	Sangat Kurang

Tabel 3.1 Interval Nilai Capaian Kinerja

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pada tahun 2024, secara umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus diwujudkan yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	42	42	100	Faktor pendorong kegagalan: (1) lembaga calon penerima hibah keagamaan / pendidikan keagamaan tidak melengkapi berkas kelengkapan administrasi pencairan hibah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, (2) lembaga tidak tertib dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan hibah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Sosialisasi pelaksanaan hibah keagamaan dan pendidikan keagamaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah untuk mendorong tertib pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah.
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	95	95	100	Faktor pendorong keberhasilan: Semakin tertibnya Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya.	Terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD lingkup kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	95	95	100	Faktor pendorong keberhasilan: Semakin tertibnya Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya.	Terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD lingkup kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan" pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 telah mencapai 100% dengan kategori Baik dari target 42% terealisasi 42%. Dan sasaran "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan 2 (dua) indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat" dan "Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat" yang dievaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 masing-masing telah mencapai 100% dengan kategori Baik dari target 95% terealisasi 95%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023				SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	42	42	100	Baik	Biro Kesra
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	95	95	100	Baik	Biro Kesra
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	95	95	100	Baik	Biro Kesra

Tabel 3.3Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2024

2. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pertama "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan " pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami capaian 100%,

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis ke dua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat" dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 terhadap pencapaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan, walaupun adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran terhadap dampak Pandemi

Covid-19 tetapi seluruhnya menunjukkan konsistensi hasil yang sama yaitu capaian kinerja telah mencapai 100% tiap tahunnya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	100	117,65	80	80,65	100,81	85	87,1	102,47	40	39	97,50	42	42	100,00
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	86,96	102,31	70	70	100,00	85	87,88	103,39	90	90	100,00	95	95	100,00
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	81,63	96,04	80	83,33	104,16	85	95,59	95,59	90	90	100,00	95	95	100,00

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2019-2024

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian kinerja sasaran strategis pertama "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan " pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 terhadap target akhir 2024 telah tercapai sebesar 100% dengan tingkat kemajuan Baik. Capaian kinerja sasaran strategis kedua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat" dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 terhadap target akhir 2024 telah tercapai sebesar 100% dengan tingkat kemajuan Baik.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023 (%)	TARGET AKHIR 2023 (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	42	42	Baik
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	95	95	Baik
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	95	95	Baik

Tabel 3.5 Capaian Kinerja 2024 terhadap Target Akhir 2024

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	42	42	100	Faktor pendorong kegagalan: (1) lembaga calon penerima hibah keagamaan / pendidikan keagamaan tidak melengkapi berkas kelengkapan administrasi pencairan hibah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, (2) lembaga tidak tertib dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan hibah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Sosialisasi pelaksanaan hibah keagamaan dan pendidikan keagamaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah untuk mendorong tertib pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah.
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	95	95	100	Faktor pendorong keberhasilan: Semakin tertibnya Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya.	Terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD lingkup kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	95	95	100	Faktor pendorong keberhasilan: Semakin tertibnya Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya.	Terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD lingkup kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan program kegiatannya

Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mendukung capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah", Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 438.396.990.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 427.304.783.126,- atau terserap 97,47%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,53% dari dukungan anggaran yang diterima. Untuk sasaran kedua kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada indikator Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.025.000,000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.018.818.146,- atau terserap 99,40%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,60% . Pada indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.277.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.271.679.096,- atau terserap 99,54%. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,46%.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	42	42	100	438.396.990.000	427.304.783.126	97,47	2,53
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	95	95	100	1.025.000.000	1.018.818.146	99,40	0,60
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	95	95	100	1.277.500.000	1.271.679.096	99,54	0,46

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis 2024

6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, tahun 2024 ini Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	% CAPAIAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	% CAPAIAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100	Menunjang
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	Menunjang
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	100		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100	Menunjang

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2024

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Oleh karena itu sistem perencanaan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Hal ini karena dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu.

Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. **Alokasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2024 adalah sebesar Rp 441.239.749.000,- (empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 430.133.091.035,- atau sebesar 97,48%.**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD PERUBAHAN TA 2023 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT (Rp)	REALISASI APBD TA 2023 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT (Rp)	DEVIASI (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN (%)
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	540.259.000	537.810.667	2.448.333	99,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.259.000	537.810.667	2.448.333	99,55
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.259.000	399.104.707	1.154.293	99,71
2	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	140.000.000	138.705.960	1.294.040	99,08
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	440.699.490.000	429.595.280.368	11.104.209.632	97,48
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	438.396.990.000	427.304.783.126	11.092.206.874	97,47
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	434.236.115.000	423.212.273.474	11.023.841.526	97,46
4	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.160.875.000	4.092.509.652	68.365.348	98,36
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	1.025.000.000	1.018.818.146	6.181.854	99,40
5	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	296.454.000	294.927.977	1.526.023	99,49
6	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	408.546.000	405.967.544	2.578.456	99,37
7	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	320.000.000	317.922.625	2.077.375	99,35
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Non Rakyat Pelayanan Dasar	1.277.500.000	1.271.679.096	5.820.904	99,54
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	302.500.000	302.480.900	19.100	99,99
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	975.000.000	969.198.196	5.801.804	99,40
	TOTAL	441.239.749.000	430.133.091.035	11.106.657.965	97,48

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2024

3.3 INOVASI

Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kinerjanya adalah:

1. Silap Online Desa Dampingan

Sistem Pelaporan Online (Silap Online) Desa Dampingan, merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. Program tersebut dimulai sejak tahun 2019 dalam upaya mendukung

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, utamanya dengan melibatkan secara langsung semua Perangkat Daerah terjun langsung ke desa-desa miskin untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Sistem yang dikembangkan dimaksudkan untuk mendapatkan data Perangkat Daerah yang melakukan pendampingan, desa-desa yang didampingi serta upaya-upaya intervensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan data sekaligus sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap efektifitas pelaksanaan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera.

2. Silap Online CSR

Guna mengetahui kontribusi dan peran CSR perusahaan dalam pembangunan daerah di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun Sistem Pelaporan Online CSR "SiLap CSR" untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program/kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di Jawa Tengah, yang telah di-*launching* oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 2021. Dengan adanya aplikasi SiLap CSR tersebut, diharapkan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan CSR oleh perusahaan makin efektif dan efisien, dan kontribusi CSR bagi pembangunan daerah di Jawa Tengah makin meningkat. Pelaporan melalui Silap CSR dilakukan oleh perusahaan dengan menyebutkan kegiatan, *output*, nominal, waktu, lokasi serta keterangan yang perlu disampaikan terkait kegiatan CSR yang sudah dilakukan. Kegiatan CSR dibagi menjadi 12 (dua belas) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga Seni Budaya dan Pariwisata, Kesejahteraan Sosial, Usaha Ekonomi Rakyat, Keagamaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertanian Perkebunan Kehutanan Peternakan Kelautan dan Perikanan, Energi Baru Terbarukan, Kedaruratan, Pendampingan Umum dan Infrastruktur.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan kategori "Baik". Hal ini didukung dengan data yaitu Capaian kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan indikator kinerja "Meningkatkan sinergi kebijakan daerah" telah tercapai 99,16% dengan kategori "Baik".

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam pencapaian target kinerja kedepan. Maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja ditahun yang akan datang pelaksanaan kegiatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pola komunikasi dan sinergi dari semua ASN di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlunya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.
3. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan kegiatan yang akan dicapai.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja proses Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Merencanakan kegiatan sesuai dengan isu strategis dan kondisi saat ini sehingga mencapai target kinerja keuangan dapat terpenuhi.
6. Perlunya sosialisasi, evaluasi dan koordinasi terkait syarat- syarat pengajuan hibah, standarisasi pada penerimaan Hibah, penyesuaian jumlah penerima hibah insentif pengajar keagamaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN

Kegiatan Jateng Bersholawat Tahun 2024 – Biro Kesejahteraan Rakyat





